



Peran Majelis Pendidikan Daerah dalam Melibatkan Peran Masyarakat Meningkatkan Mutu Pendidikan di Bener Meriah

Lasma Farida¹, Abdussukur²

¹MIN 2 Bener Meriah, Aceh, Indonesia

²IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

E-mail: syukurcorp@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 31-08-2024

Diterima: 13-09-2024

Diterbitkan: 17-09-2024

Keywords:

Regional Education Council; Quality; Education

Kata Kunci:

Majelis Pendidikan Daerah; Kualitas; Pendidikan

Abstract

The community's role to improving the quality of education is still weak. MPD with supervisory duties must assist community participation through school committees. This study aims to analyze the management of the Regional Education Council (MPD) and the role of the community in improving the quality of education in Bener Meriah. This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques in the study include interviews, documents, and observations. The data analysis techniques used are data reduction, presentation, and verification. The results of this study show that MPD management involves the role of the community in improving the quality of education in Bener Meriah, which consists of planning, implementation, supervision, and evaluation management. The management of MPD in involving the community is going well, even though at the level of implementation and execution of activities by the committee is slow, because the function of MPD is limited to mentoring, not execution.

Abstrak

Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan masih lemah. MPD yang punya tugas pengawasan mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dalam melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi wawancara, dokumen, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen MPD dalam melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah terdiri dari manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi. Manajemen MPD dalam melibatkan masyarakat ini berjalan dengan baik, meskipun di tingkat implementasi dan ekskusi kegiatan oleh



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

komite berjalan lambat, karena fungsi MPD hanya sebatas pada pendampingan bukan ekskusi.

Pendahuluan

Setiap organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, akan sukses dalam melaksanakan programnya jika didukung oleh manajemen yang baik dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Dewi Hanggraeni, 2012). Hal ini juga berlaku untuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD), sebuah lembaga yang merupakan bagian dari kekhususan Aceh. Secara nasional, MPD dikenal sebagai Dewan Pendidikan (Hendarman, 2012). MPD dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perannya sebagai badan pemikir, pemberi pertimbangan, motivator masyarakat, pengawas dan penilai penyelenggaraan pendidikan, serta sebagai mediator (Bahri & Hayati, 2023; Zulkarnein et al., 2020).

MPD berfungsi sebagai lembaga independen yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Peran dan fungsinya diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 24 Tahun 2006, yang mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja MPD di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur struktur organisasi Sekretariat Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah. MPD di Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 420/289/SK/2015, dengan tujuan utama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam menciptakan kebijakan dan program pendidikan (Turham, 2017).

MPD Kabupaten Bener Meriah fokus pada upaya memajukan pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. MPD menjalankan berbagai program, termasuk membentuk Forum Komite Pendidikan Kecamatan (FKPK), melakukan monitoring, dan mendata sarana dan prasarana sekolah. Peran utama MPD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan dalam menjalankan peran ini, MPD membutuhkan manajemen yang baik.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bener Meriah masih kurang. Banyak sekolah yang hanya melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan, dan tidak sampai pada tahap evaluasi. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka juga menjadi masalah, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pendidikan (Turham, 2017).

Beberapa riset terkait peran MPD ditulis oleh (Bahri & Hayati, 2023) yang fokus pada peran MPD dalam mewujudkan mutu pendidikan Islam. Sementara (Zulkarnein et

al., 2020) kontribusi MPD dalam pembangunan pendidikan. Manajerial MPD dari sisi anggaran dan akuntabilitas anggaran ditulis (Mauliza et al., 2022). Andriani menulis peran majelis pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan (Andriani et al., 2019). Riset-riset fokus pada peran langsung MPD dalam memajukan pendidikan. Sementara riset ini fokus pada peran majelis pendidikan dalam menstimulasi masyarakat agar mereka ikut serta dalam peningkatan mutu pendidikan, dengan melibatkan komite sekolah/madrasah. Riset ini fokus pada manajemen MPD dalam melibatkan masyarakat berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan.

MPD Bener Meriah berupaya untuk menggerakkan masyarakat melalui komite sekolah agar ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh MPD menjadi fokus penelitian, dengan melihat aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Rahmatulloh, 2020). MPD sebagai badan pemikir terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Meskipun menghadapi berbagai masalah, MPD Bener Meriah telah menerima kunjungan studi banding dari MPD lain di Aceh dan Sumatra Utara, yang menunjukkan bahwa lembaga ini dianggap memiliki pendekatan yang menarik dalam melibatkan masyarakat yang sangat heterogen di Bener Meriah. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang manajemen MPD Bener Meriah dalam melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam mewujudkan peran masyarakat yang efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bener Meriah, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tujuan yang ingin dicapai.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah, di Jalan Teritit-Pondok Baru, Komplek Perkantoran Serule kayu. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada 01 Februari s/d 31 Maret 2021. Ada 12 orang yang menjadi sumber data penelitian ini: Ketua MPD, Wakil Ketua, 2 Ketua Komisi, Kepala Sekretariat, Pengawas Madrasah, 2 Ketua Forum Pendidikan Komite Kecamatan, 2 Kepala Sekolah, dan 2 Ketua Komite Sekolah/madrasah.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 12 sumber, observasi manajemen MPD dalam melibatkan masyarakat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah, dan dokumentasi berupa

dokumen penyelenggaraan pendidikan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen MPD melibatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Ini adalah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Tujuan manajemen MPD adalah untuk menciptakan masyarakat Bener Meriah yang bermartabat, aman, tenram, rukun, demokratis, dan tertib, serta berbudaya, yang merupakan syarat untuk pelaksanaan syariat Islam secaramenyluruh.

Menurut wawancara dengan Bapak Tsurraya (Tsurayya, 2021), Ketua MPD Bener Meriah, manajemen sangat penting untuk pengelolaan MPD. Manajemen yang digunakan di MPD Bener Meriah termasuk manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat dan MPD Bener Meriah saling melengkapi. Begitu juga, hubungan MPD dengan semua sekolah Bener Meriah adalah seperti hubungan orang tua dan anak. MPD adalah orang tua sekolah Bener Meriah. MPD Bener Meriah dapat menerima keluhan dan pengaduan tentang masalah apa pun yang menghambat kemajuan sekolah, termasuk masalah pendidik, tenaga pendidik, saran, komite, kurikulum, pendanaan, mutu, akreditasi, dll. Sekolah, MPD, dan masyarakat akan bekerja sama untuk mencari jalan keluar atau mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Untuk mengatasi masalah yang ada, masyarakat harus terlibat, terutama dalam hal kualitas dan mutu pendidikan di Bener Meriah. Karena sekolah itu milik masyarakat, alumni akan kembali ke masyarakat. Baik atau buruknya kualitas atau produk sekolah di Bener Meriah tergantung pada seberapa besar peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan standar pendidikan di negara itu. Proses pelibatan masyarakat membutuhkan persiapan, implementasi, dan evaluasi, serta pengawasan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar pendidikan di Bener Meriah, manajemen MPD membutuhkan empat manajemen: (1) manajemen perencanaan; (2) manajemen pelaksanaan; (3) manajemen evaluasi; dan (4) manajemen pengawasan.

Manajemen Perencanaan dalam Melibatkan Peran Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan.

Ketua MPD Bener Meriah terlebih dahulu membuat program perencanaan dalam melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut terhadap masyarakat di Bener Meriah. Program-program yang disusun adalah kegiatan yang melibatkan peran masyarakat, jadwal pelaksanaan kegiatan melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah, membentuk tim dan meng SK tugaskan pelaksana kegiatan, merancang teknis pelaksanaan, menetapkan Standard Operating

Prosedure (SOP) kegiatan, membuat evaluasi dan pengawasan serta membuat rencana tindak lanjut hasil program kegiatan melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan ketua MPD dalam mensosialisasi, mempublikasi, dan mengaplikasikan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat terhadap program kegiatan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Program kegiatan peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, hasil evaluasi pada tahun sebelumnya (Tawar, 2021; Tsurayya, 2021).

Menurut Tamin (Tamin, 2021), Kepala Sekretariat MPD Bener Meriah, menjelaskan bahwa perencanaan program terdiri dari perencanaan, pengorganisasian kegiatan, membentuk tim kerja, pembagian tugas, menentukan wilayah kecamatan sasaran program, siapa yang terlibat dalam kegiatan, siapa yang diundang, profesi pemateri sesuai dengan tema program, bagaimana teknis kegiatan, perincian dana berdasarkan alokasi ketersediaan dana kegiatan, kapan program dilaksanakan serta di mana tempat pelaksanaan kegiatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Setelah perencanaan matang dari komisioner, kami dari sekretariat yang mempersiapkan segala sesuatu hal yang menyangkut surat-menurut, permohonan izin tempat, rekomendasi dari pihak terkait, SK kegiatan, dan pendanaan.

Selanjutnya pelaksanaan program peran masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah di awali dengan pembuatan perencanaan kegiatan, nama kegiatan, tujuan pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, jadwal, tempat kegiatan, metodologi kegiatan, dan pembentukan tim pelaksana program. Tim pelaksana program peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ditetap berdasarkan hasil rapat perumusan program, dalam tim ditentukan siapa fasilitator narasumber, dan peserta. Fasilitator apakah dari komisioner atau dari luar, hal ini juga direncanakan sematang mungkin agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik (Pendidikan Daerah, 2021).

Tsurayya (Tsurayya, 2021) mengungkapkan bahwa Perencanaan program peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan terdiri dari: (1) perencanaan kegiatan lokakarya komite sekolah (2) Perencanaan pembentukan Forum Pendidikan Kecamatan (3) Perencanaan training peningkatan kapasitas komite madrasah (4) Perencanaan pendampingan komite sekolah (5) Perencanaan revitalisasi komite sekolah (6) Perencanaan media Buletin Pendidikan (7) Perencanaan pertemuan regular komite sekolah (8) Perencanaan training mekanisme pengaduan, dan (9) Perencanaan stakeholder pendidikan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengundang peserta lokakarya, menetapkan metodologi, tempat dan waktu pelaksanaan, mengundang dan mengkoordinasikan kesediaan fasilitator dan narasumber untuk mengisi acara, menentukan hasil yang diharapkan (outcomes), menetapkan langkah untuk evaluasi,

dan rencana tindak lanjut.

Berdasarkan hasil observasi perencanaan dalam melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dalam perencanaannya memiliki cara/strategi tersendiri, yaitu: 1) menampung aspirasi masyarakat baik itu berupa surat masuk ke kantor MPD, curah pendapat tokoh pendidikan, pelaporan masyarakat, dan temuan di wilayah pendampingan, 2) setiap aspirasi dari masyarakat ditampung lalu didiskusikan untuk mendapatkan solusi, mediasi, atau langkah pendampingan kepada masyarakat.; (Diskusi terhadap aspirasi dari masyarakat secara umum dan masyarakat sekolah (kepala sekolah, guru, pengawas, dan komite) dalam rapat mingguan atau rapat bulan bahkan jika sifatnya mendadak dan penting rapat bisa dilakukan secara spontan dengan cara mengadakan rapat tidak berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, dan 3) ketua MPD bersama Ketua Komisi memiliki metode atau strategi tersendiri dalam melibatkan peran masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Mashurah (Tsurayya, 2021) membenarkan hasil observasi ini.

Perencanaan kegiatan melibatkan peran masyarakat untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di MPD Bener Meriah terdiri dari kegiatan perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan melibatkan peran masyarakat untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Penentuan metode atau strategi dan materi yang disampaikan fasilitator dan narasumber yang disampaikan ketika kegiatan lokakarya komite sekolah, Forum Pendidikan Kecamatan, TPMPS, training peningkatan kapasitas komite madrasah, pendampingan komite sekolah, revitalisasi komite sekolah, media Buletin Pendidikan, pertemuan regular komite sekolah, training mekanisme pengaduan, dan stakeholder pendidikan. Perencanaan terhadap pelibatan peran masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah memiliki dampak positif bagi sekolah, yaitu: (1) sekolah bersama masyarakat menyusun visi, misi, dan program sekolah, (2) emosi masyarakat tersentuh untuk merasa memiliki sekolah dan salah satu pengontrol mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh sekolah, (3) tercipta keharmonisan antara sekolah, komite, dan masyarakat, (4) Majelis Pendidikan Daerah sebagai mediator dalam perselisian antar warga sekola atau antar warga sekolah dengan masyarakat dan lain sebagainya, (5) pendampingan proses akreditasi sekolah.

Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Melibatkan Peran Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Setelah Menyusun perencanaan manajemen melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Selanjutnya Ketua MPD melakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah.

Tsurayya (Tsurayya, 2021) menyatakan bahwa pelaksanaan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah seperti berikut ini.

1. Lokakarya Komite Madrasah

Lokakarya Komite Sekolah dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Juli 2017, bertempat di hotel Linge Land Takengon kabupaten Aceh Tengah. Narasumber dalam Lokakarya Komite Sekolah, sebagai berikut; Dr. Mujiburrahman (Dekan Tarbiyah UIN Ar-Raniry), M. Ridha (Konsultan Pendidikan), dan Dicky Arisandi (konsultan Bapenas) Pelayanan dasar. Peserta pelatihan ini diikuti 120 orang, terdiri dari Komite sekolah Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs sederajat Kabupaten Bener Meriah. Gambaran umum Lokakarya, subtansi materi pelatihan disiapkan oleh MPD, materi pelatihan disiapkan oleh narasumber terkait peran dan fungsi komite sekolah, perangkat organisasi komite sekolah, memahami prinsip-prinsip menjalankan roda organisasi Komite, dan memahami prinsip-prinsip manajemen komite sekolah/madrasah.

Ketua Komisi B bidang pendidikan dan tenaga kependidikan (Turham, 2021) menambahkan bahwa Kegiatan Lokakarya Komite Sekolah dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan metodologi pembelajaran Androgogy, persentasi oleh narasumber, curah pendapat, diskusi kelompok, berbagi pengalaman, Role Play simulasi peran stakeholder pendidikan, dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Lokakarya Komite Sekolah berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman dasar komite sekolah tentang regulasi peran serta masyarakat, meningkatnya kelengkapan organisasi, terindifikasi kondisi kekinian, dinamika dan tantangan organisasi, dan adanya komitmen dan kesepakatan serta tindak lanjut dari peserta lokakarya. Kegiatan lokarya ini berbentuk program kegiatan yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan dan pengajuan program serta diaplikasikan ke sekolah-sekolah.

2. Pembentukan Forum Pendidikan Kecamatan (FKPK)

Pembentukan Forum Komite Pendidikan Kecamatan (FKPK) dilaksanakan dengan harapan akan dapat menghasilkan beberapa perubahan terhadap penguatan dan dukungan kepada komite sekolah kedepannya. Kegiatan pembentukan FKPK dilaksanakan tiga tahun sekali, tahun 2017 merupakan tahun terakhir pembentukan FKPK oleh MPD Bener Meriah, direncanakan pada bulan Agustus tahun 2021 kegiatan pembentukan FKPK akan kembali dibentuk pada setiap kecamatan di Bener Meriah (Tsurayya, 2021).

Menurut Tawar, "Sebelum menentukan kualifikasi peserta, MPD melakukan observasi dan menentukan peserta FKPK kecamatan. Peserta berjumlah lima puluh orang, terdiri dari komite sekolah/madrasah tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA Sekabupaten Bener Meriah. Tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Pembentukan FKPK dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan

metodologi pembelajaran orang dewasa. Teknis pelaksanaan kegiatan persentasi, curah pendapat, diskusi kelompok, dan tanya jawab (Tawar, 2021).

Turham menjelaskan bahwa Pembentukan FKPK kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada pada tahun 2017 baru tiga kecamatan yang dibentuk, yakni Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Permata yang dilakukan secara paralel pada tanggal 21 Agustus 2017 di aula Kantor Camat masing-masing. Fasilitator sekalian sebagai narasumber dalam pembentukan FKPK adalah Tsurayya di Kecamatan Timang Gajah, Gunawan Tawar di Kecamatan Timang Gajah, Fakhruddin di Kecamatan Bukit, Dasran di Kecamatan Permata, Labaika Kecamatan Permata, dan saya di Kecamatan Bukit. Sekarang, setelah pembentukan FKPK dilakukan pendampingan sesuai daerah pendampingan masing-masing secara langsung ke sekolah baru bisa dilakukan pada pertengahan Januari 2021. Sedangkan pada tahun 2020 kegiatan pendampingan berupa curah pendapat dan diskusi menyangkut mutu kualitas pendidikan di Bener Meriah dilaksanakan secara virtual (Turham, 2021).

Hasil yang diharapkan dari Pembentukan FKPK adalah: (a) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman komite pendidikan kecamatan terhadap kerangka regulasi peran serta masyarakat disatuan pendidikan sehingga forum pendidikan kecamatan menjadi wadah komunikasi dan tempat transfer informasi antar komite sekolah di masing-masing kecamatan, (b) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman FKPK sehingga dapat menjadi tempat diskusi dalam pemahaman tentang peran dan fungsi komite secara khusus dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan pendidikan secara umum, (c) teridentifikasi kondisi kekinian organisasi komite sekolah, dan (d) tersedianya informasi praktek yang baik peran komite sekolah dalam mendukung tatakelola layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Pendidikan Daerah, 2021).

3. Training Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah

Pelatihan peningkatan kapasitas komite sekolah merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi Lokakarya Komite Sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan pendidikan.

Tawar mengatakan bahwa Hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan layanan pendidikan termasuk untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa di sekolah. Komponen utama di sekolah adalah siswa, pendidikan, dan tenaga kependidikan, kurikulum, serta fasilitas pendidikan. Selain itu pemangku kepentingan (stakeholder) juga mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Dalam hal ini orang tua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerjasama secara sinergis dengan sekolah. Maka dari itu manajemen MPD Bener Meriah dalam melibatkan masyarakat salah satunya adalah dengan

manajemen berbasis sekolah, yang dalam aspek teknis edukatif dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman peran dan fungsi komite, perangkat organisasi sekolah, penyelesaian masalah dengan musyawarah (Tawar, 2021).

Komponen kegiatan Training Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah meliputi pengorganisasian seluruh kegiatan (perencanaan, persiapan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pelaporan, koordinasi dengan DIKBUD Bener Meriah, dan melakukan konsolidasi dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait. Kegiatan meliputi tahapan persiapan dan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan monitoring dan evaluasi. Metodelogi pelatihan ini dengan pendekatan partisipatif dan andragogi. Dengan metode curah pendapat, diskusi kelompok, simulasi, dan membangun kepercayaan. Pesertanya komite sekolah tingkat dasar sampai lanjutan atas, forum komite kecamatan, pengawas daerah dan kelompok kerja pengawasa sekolah dengan narasumber terdiri dari Dinas Pendidikan, Cut Asmaul Husna dari Konsultan Pendidikan Staf Ahli DPRA komisi lima dan Diky Arisandi utusan Konsultan Bapenas kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan Juni 2018 dan untuk tahun 2021 ini dilaksanakan pendampingan kegiatan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah (Turham, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPD Bener Meriah bahwa kegiatan Training Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini terlaksanakan berdasarkan tahapan pelaksanaan meliputi indentifikasi peserta dan memastikan tempat pelatihan serta penyiapan undangan untuk peserta pelatihan. Kegiatan Pelaksanaan diawali dengan tahapan perencanaan, dan diakhiri dengan tahapan monitoring dan evaluasi. Pembagian materi berdasarkan tinjauan regulasi tentang kebijakan kependidikan baik tingkat nasional maupun daerah, pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah, pembangunan pola komunikasi antara komite dengan sekolah, dan penyusunan rencana tindak lanjut agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah.

4. Revitalisasi Komite Sekolah

Berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keterwakilan orang tua siswa/wali siswa dalam pendidikan disebut Komite Sekolah/Madrasah. Komite sekolah/madrasah merupakan organisasi komite sekolah/madrasah yang professional dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Upaya meningkatkan tatakelola organisasi komite sekolah/madrasah serta mendorong kemandirian komite dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Tsurayya (Tsurayya, 2021), Majelis pendidikan melalui kegiatan Revitalisasi Komite Sekolah ikut ambil bagian dalam memberikan peningkatan kapasitas,

peserta kegiatan adalah Pengawas, Kepala sekolah/madrasah dan Komite Sekolah yang menjadi pilot project MPD Bener Meriah. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan metodologi pembelajaran orang dewasa. Kegiatan diisi dengan persentasi, curah pendapat, diskusi kelompok, dan tanya jawab.

Kegiatan Revitalisasi Komite Sekolah dilakukan dengan membagi dua wilayah, wilayah Kecamatan Wih Pesam, Timang Gajah, Gajah Putih, Pintu Rime Gayo dilaksanakan di SMAN 3 Timang Gajah. Kecamatan Bukit, Bandar, Bener Kelipah, Permata, Mesidah, dan Syiah Kuala dilaksanakan di SMPN 1 Bandar pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 2019 secara paralel. Selanjutnya pada tahun 2021 masih tetap dilakukan kegiatan Revitalisasi berdasarkan wilayah dan surat undangan Revitalisasi yang diterima oleh MPD. Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah komite mampu mengelola sekolah secara baik, teridentifikasi potensi sekolah, terbangunnya pola komunikasi, dan tersusunnya rencana kerja komite (Turham, 2021).

Kegiatan revitalisasi komite sekolah untuk wilayah Bandar diikuti oleh enam kecamatan terdekat yang ikut bergabung di SMPN I Bandar. Fakta di lapangan menggalang dana hanyalah memungut biaya kebutuhan sekolah dari wali murid saat ini dapat tergolong pungli berdasarkan Pempers 87 tahun 2016 tentang sumber pungli. Melalui regulasi dan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh MPD sudah menyadarkan komite untuk memperkuat keuangan komite dengan menggali potensi dan mengembangkan SDM yang dimiliki.

5. Media Buletin Pendidikan

Media merupakan sarana penyampaian message berupa informasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan. Maka dari itu media sangat penting peranannya dalam komunikasi dan publikasi program kegiatan suatu lembaga pendidikan. Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 keterkaitan dengan transparansi informasi publik menjadi kerangka acuan yang sangat penting dalam membuka ruang informasi kepada masyarakat.

Kondisi pendidikan Kabupaten Bener Meriah perlu diketahui oleh publik sebagai motivasi dan masukan terhadap instansi juga bagi MPD dalam memberikan pandangan dan harapan masyarakat. Untuk mengefektifkan bulletin perlu adanya jurnalis yang akan mengisi tulisan pada bulletin. Buletin sangat berguna sebagai penyebaran ilmu, menjalin kerjasama, dan melahirkan jurnalis warga. Proses pelaksanaan sebelum Harie terbit diberikan guru dan warga sekolah diberi training jurnalistik pertama dengan tutor saya dan Fakruddin di kantor MPD diikuti oleh 20 peserta dari guru, siswa, tokoh masyarakat, wartawan, dan komite. Kegiatan kedua di kafe koma tiga dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari guru dan siswa, wartawan, dan santri. Tutor pada kegiatan ini Turham dan Arsadi Laksamana (Turham, 2021).

Materi pada training ini adalah dasar-dasar jurnalis, pedoman dasar penulisan berita, dan penulisan karya ilmiah (Jaya, 2021). MPD Bener Meriah telah melaksanakan kegiatan literasi berupa Buletin Harie Pendidikan yang diterbitkan sebulan sekali dengan tulisan yang bersumber dari hasil liputan MPD, aduan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Proses pelaksanaan melalui kerjasama dengan masyarakat dan training jurnalis.

6. Pertemuan Reguler Komite Sekolah

Pertemuan Reguler Komite Sekolah dilaksanakan untuk menghasilkan beberapa perubahan terhadap penguatan dan dukungan kepada komite sekolah ke depannya. Kegiatan Reguler Komite Sekolah diikuti oleh komite sekolah satuan pendidikan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Bener Meriah. Untuk pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah terkait dengan advisory, supporting, controlling dan, mediating. Materi disiapkan oleh narasumber pertemuan pertama dilakukan di sekretariat MPD pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 2019 laksanakan di tempat yang berbeda pada tanggal yang sama yaitu di SMPN 3 Pintu Rime Gayo, Timang Gajah dan Bukit. Selanjutnya pada tahun 2020 kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, pada tahun 2021 kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 (Tawar, 2021).

Menurut Taqwa (Taqwa, 2021), Ketua komite MIN 13 bahwa Pertemuan regular pada tahun 2017 dan 2019 dilaksanakan pada lima tempat berbeda secara bersamaan pada tanggal yang sama. Peserta mendapatkan materi dari fasilitator terkait dengan peran dan fungsi komite sekolah, perangkat organisasi dan prinsip-prinsip menjalankan roda organisasi.

7. Training Mekanisme Pengaduan

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi sebagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

Tsurayya menyatakan bahwa sebagai abdi masyarakat, salah satu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian dengan mendengarkan keluhan/pengaduan masyarakat terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan menindaklanjutinya dengan Tindakan nyata perbaikan pelayanan terhadap masyarakat Bener Meriah, maka untuk itu kegiatan training mekanisme pengaduan sebagai salah satu manajemen pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peran Masyarakat (Tsurayya, 2021).

Kadarman, Ketua Komisi Kurikulum dan evaluasi menyatakan bahwa Salah satu metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan adalah partisipasi masyarakat yang dimulai dengan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap ketidakpuasan atas layanan pendidikan dan menurunnya mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Maka untuk itu perlu dilatih menampung berbagai keluhan masyarakat terhadap mutu pendidikan di Bener Meriah (Kadarman, 2021).

Hasil observasi peneliti dengan Bapak Basyawirah Komite MTsN 2 Bener Meriah menyatakan bahwa adanya kegiatan training mekanisme pengaduan yang dilaksanakan di aula Sekda Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 6 s/d 7 Desember 2017. Pada tahun 2020 kegiatan training berjalan secara online sehingga hasilnya tidak maksimal sebagaimana pada tahun sebelumnya. Sekarang pada awal Februari kegiatan kembali normal dan komite, kepala sekolah dan dewan guru sasaran akreditasi 2021 sedang fokus menyiapkan bahan akreditasi sekolah/madrasah.

Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan

Setelah manajemen perencanaan program kegiatan dan manajemen pelaksanaan program, MPD Bener Meriah melanjutkan kepada tahapan selanjutnya yaitu manajemen evaluasi dan pengawasan. Sebagaimana salah satu fungsi MPD adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Tsurayya menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan kegiatan pendampingan komite sekolah, MPD evaluasi program kerja komite sekolah, dan evaluasi melalui akun sosial media (Tsurayya, 2021).

Pendampingan Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dan pihak sekolah, orang tua, masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community-based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management).

MPD Evaluasi Program Kerja Komite Sekolah

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah lakukan evaluasi

terhadap 29 komite sekolah yang menjadi pilot projek bertempat di aula SMA Binaan Pante raya pada Desember 2017 dan aula SMAN 1 Bukit pada tahun 2019. Hasil wawancara dengan Bapak Tsurayya ketua MPD Bener Meriah, pada saat ini pertengahan Februari 2021 kegiatan evaluasi langsung mendatangi sekolah-sekolah pilot projek. Kegiatan lebih dfokuskan kepada evaluasi program kerja komite dan kepala sekolah yang berkaitan dengan akriditas tahun 2021 (Tsurayya, 2021).

Menurut Kadarman (Kadarman, 2021) dan Turham (Turham, 2021) Evaluasi dilakukan terkait hasil pendampingan selama ini dan melihat program yang akan dilakukan, struktur kepengurusan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah sampai memenuhi ketentuan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Melihat dan supervise kegiatan dan dokumen kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh komite dan kepala madrasah berdasarkan program-pgoram kegiatan yang sudah disosialisasi/dibina selama ini oleh MPD Bener Meriah serta melihat sejauhmana rencana tindak lanjut yang sudah dirangkumkan oleh sekolah *pilot projek*. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh MPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan berikutnya.

Melalui Akun Media Sosial Sekolah MPD Bener Meriah Melaksanakan Kegiatan Evaluasi/Mengawasi Mutu dan Kualitas Pendidikan

Seiring perkembangan zaman dengan komunikasi dan teknologi maka Lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) memanfaatkan sarana komunikasi media sosial untuk melakukan evaluasi dan pengawasan mutu dan kualitas pendidikan di Bener Meriah. Kegiatan evaluasi dan pengawasan ini dilaksanakan sberdasarkan udah terlaksananya program kegiatan Media dan bulletin pendidikan yang mana sudah ada training jurnalis, maka kegiatan jurnalis dan buletin pendidikan dari sekolah-sekolah bisa di pantau melalui akun media sosial sekolah/humas sekolah atau pimpinan sekolah/madrasah di Bener Meriah. Dengan kegiatan ini dapat menjangkau ke seluruh wilayah Bener Meriah dan sekolah pilot projek dapat terpantau secara keseluruhan bagaimana perkembangannya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan (Tsurayya, 2021).

Menurut Turham, dengan akun media sosial, secara nasional bahkan internasional bisa memantau keberadaan lembaga pendidikan tersebut. Semua kegiatan tersebut sudah kita bahas pada kegiatan training jurnalis, maka dari itu MPD membuka pertemuan seluas-luasnya di media sosial setiap sekolah *pilot projek* dan sekolah lainnya di seluruh Kabupaten Bener Meriah. MPD juga memberi peluang sebesar-besar untuk semua sekolah untuk menitipkan tulisannya di Buletin Harie Pendidikan, media online dan media cetak serta kami siap membantu untuk mempublikasikannya (Turham, 2021).

Tawar (Tawar, 2021) mengungkapkan hasil pantauannya terhadap pengawasan terhadap beberapa sekolah dalam hal evaluasi melalui postigan program unggulan dan

hasil belajar serta prestasi yang diraih oleh sekolah/madrasah yang diikutinya dari akun media sosial dari beberapa sekolah/madrasah di Bener Meriah, menyatakan bahwa sejauh ini sebagian besar sekolah sudah mempublikasikan kegiatannya di sosial media dan sebagian kecilnya sudah mempublikasi kegiatan sekolahnya secara rutin dan sesuai jadwal kegiatan di sekolah yang bersangkutan. Untuk hal ini MIN 13 Bener Meriah, SMA Binaan, SMPN 1 Wih Pesam, dan SMP Pondok Sayur sudah mempublikasi kegiatan sekolahnya secara rutin dan sesuai dengan jadwal kegiatan pengembangan sekolah/madrassahnya. Baik itu di-post di facebook, istagram, website atau media cetak dan *online*.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terhadap kegiatan evaluasi dan pengawasan sudah dilaksanakan secara akun sosial media. Kegiatan ini sangat efektif dan efisien serta actual, sehingga sekolah/madrasah tersebut akan lebih dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Publikasi secara sosial media menjadi ajang promosi sekolah tanpa mengeluarkan biaya dan dapat dikerjakan kapanpun dan oleh semua warga sekolah, tidak mesti oleh kepala sekolah atau humas. Tentu saja untuk hal ini harus memperhatikan rambu-rambu publikasi dan undang-undang yang berlaku terhadap tata cara menggunakan media sosial.

Kendala dalam manajemen pengelolaan MPD Bener Meriah, berupa luasnya wilayah kerja, letak geografis Kabupaten Bener Meriah yang berada di daerah pergunungan, mata pencaharian masyarakat sebagian besarnya petani, kultur masyarakat yang beragam suku, jumlah personil yang hanya berjumlah 15 orang dengan dana turun ke lapangan sangat terbatas, dan pencairan dana untuk kegiatan sering tidak sesuai dengan yang direncanakan. Rekomendasi hasil temuan di lapangan kurang mendapat respon dari pemerintah daerah. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi kebijakan Ketua MPD dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

Analisis Manajemen Pelibatan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai komponen penting dalam pengelolaan pendidikan (Ibrahim Umasugi, 2023), dan manajemen Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik (Sholihat, 2017), tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah (Asniyati, 2021). Dalam hal ini, peningkatan peran komite sekolah adalah salah satu pendekatan utama (Hermanto et al., 2024; Mar'ati, 2022). Komite sekolah, sebagai mitra strategis, terlibat dalam setiap fase perencanaan, mulai dari menemukan kebutuhan lokal hingga membuat program yang sesuai dengan komunitas (Damanik, 2019; Gamar & Maliki, 2023; Khoiri, 2022).

Pada fase implementasi, masyarakat semakin terlibat dalam pendidikan melalui

berbagai program, seperti pertemuan komite sekolah rutin dan pembentukan forum komunikasi antar komite di tingkat kecamatan. Keterlibatan yang berkelanjutan dari orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Sebagai contoh, forum komunikasi antar komite memungkinkan sekolah di berbagai kecamatan berbagi pengalaman dan berbagi *best practices*. Pada akhirnya, ini meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) menerbitkan buletin untuk tetap jelas dan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen pemangku kepentingan. Buletin yang diterbitkan secara rutin ini tidak hanya menyediakan informasi tentang program dan kegiatan komite sekolah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Fithriani, 2019; Gamar & Maliki, 2023).

Tahap evaluasi dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa program berfungsi dengan baik. Evaluasi partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengawasan, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kejelasan tentang pengelolaan pendidikan (Isroani & Huda, 2022; KHOIRI, 2020). Di Kabupaten Bener Meriah, evaluasi program komite dilakukan melalui pertemuan rutin yang melibatkan perwakilan masyarakat. Ini tidak hanya memungkinkan penilaian yang objektif terhadap kinerja komite tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan program berdasarkan umpan balik mereka.

Penggunaan teknologi digital dalam evaluasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Penggunaan media sosial sebagai alat evaluasi sebagai inovasi yang relevan. Dengan menggunakan platform media sosial, masyarakat dapat secara cepat menyampaikan keluhan dan masukan mereka, yang kemudian dievaluasi oleh tim evaluasi untuk membuat program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Mahatmi, 2022).

Secara umum, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah menggunakan model manajemen pendidikan yang menggabungkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Model ini sejalan dengan konsep-konsep ahli pendidikan. Metode ini telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat hubungan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pada akhirnya, strategi ini akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Manajemen Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Bener Meriah melibatkan peran yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan di

Bener Meriah. Perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pengawasan dan evaluasi adalah bagian dari manajemen MPD. Proses kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap persiapan dan perencanaan melibatkan koordinasi dengan instansi atau dinas terkait tentang rencana dan pelaksanaan kegiatan dan (1) menyiapkan dan mengajukan TOR dan anggaran kegiatan. Tahap pelaksanaan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan mengidentifikasi peserta dan memastikan tempat pelat. Untuk memenuhi peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan di Bener Meriah, MPD Bener Meriah melakukan kegiatan seperti lokakarya komite sekolah, pembentukan Forum Komite Pendidikan Kecamatan (FKPK), pelatihan peningkatan kapasitas komite sekolah, pendampingan komite sekolah, revitalisasi komite sekolah, media dan buletin pendidikan, pertemuan rutin komite sekolah, pelatihan mekanisme pengaduan, dan lokakarya staholder.

Daftar Rujukan

- Andriani, Y., Trisnamansyah, S., & Iriantara, Y. (2019). Peran dan Fungsi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA Muhammadiyah di Kabupaten Bandung. *Nusantra Education Review*, 1(2).
- Asniyati. (2021). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 2(2). <https://doi.org/10.46838/jbic.v2i2.116>
- Bahri, S., & Hayati, C. I. (2023). Upaya Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengwujudkan Mutu Pendidikan Islam di Kota Lhokseumawe. *Edukasi Islami: Jurnal*
- Damanik, R. (2019). PENGARUH MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU SEKOLAH. *Serunai : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.37755/sjip.v5i1.153>
- Dewi Hanggraeni. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Fithriani, F. (2019). Manajemen Hubungan Masyarakat Dengan Lembaga Sekolah. *Intelektualita*, 5(02).
- Gamar, N., & Maliki, P. L. (2023). EFEKTIVITAS MANAJEMEN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i2.3920>
- Hendarman. (2012). Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(1). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i1.67>
- Hermanto, H., Muspawi, M., & Rahman, K. A. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Keberhasilan Menejemen Berbasis Sekolah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3450>
- Ibrahim Umasugi. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

- Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(9).*
- Isroani, F., & Huda, M. (2022). Strengthening Character Education Through Holistic Learning Values. *QUALITY, 10(2)*. <https://doi.org/10.21043/quality.v10i2.17054>
- Jaya, S. (2021). *Wawancara*.
- Kadarman. (2021). *Wawancara*.
- Khoiri. (2022). Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan di SDN Patuk I Kabupaten Gunungkidul. *Media Manajemen Pendidikan, 4(2)*. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.8774>
- Khoiri, K. (2020). Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SDN Patuk I Kabupaten Gunungkidul). *Seminar Nasional Pendidikan*.
- Mahatmi, M. W. (2022). Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dan Website sebagai Media Informasi di Sekolah Akar Rumput. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 5(3)*. <https://doi.org/10.33633/ja.v5i3.515>
- Mar'ati, A. (2022). Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 10(2)*. <https://doi.org/10.20961/jkc.v10i2.65774>
- Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 8(1)*.
- Pendidikan Daerah, M. (2021). *Laporan Kegiatan MPD*.
- Rahmatulloh, R. (2020). Peran Manajemen Humas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTSN 2 Lamongan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 2(2)*. <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.2.108-123>
- Sholihat, S. S. (2017). Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Dan Mutu Layanan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 14(1)*. <https://doi.org/10.17509/jap.v24i1.6497>
- Tamin. (2021). *Wawancara*.
- Taqwa. (2021). *Wawancara*.
- Tawar, G. (2021). *Wawancara*.
- Tsurayya. (2021). *Wawancara*.
- Turham. (2017). *Peran dan Fungsi MPD Kabupaten Bener Meriah*.
- Turham. (2021). *Wawancara*.
- Zulkarnein, S., Yusrizal, Y., & Niswanto, N. (2020). Kontribusi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pembangunan Pendidikan. *Visipena, 11(2)*. <https://doi.org/10.46244/visipena.v11i2.1214>